

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. KINERJA PEMBANGUNAN INDONESIA

Di tengah situasi global yang tidak pasti, Indonesia terus mencapai kemajuan di berbagai bidang. Pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan terus didorong pada empat jalur (*track*) yaitu pro-pertumbuhan (*pro-growth*), pro-lapangan kerja (*pro-job*), pro-pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), dan pro-lingkungan (*pro-environment*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Pro-lingkungan, yang ditambahkan sejak tahun 2009, penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan menjamin keberlanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Dalam tahun 2011, perekonomian Indonesia tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2 persen), di tengah perlambatan ekonomi dunia, krisis utang Eropa, perubahan iklim dan bencana alam di tingkat global, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Stabilitas ekonomi terkendali dengan laju inflasi terjaga sebesar 3,8 persen, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta cadangan devisa yang meningkat menjadi USD 110,1 miliar. Ketahanan fiskal tetap terjaga dengan defisit anggaran sebesar 1,2 persen PDB dan stok utang menurun menjadi 24,3 persen PDB.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen didukung oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan risiko eksternal berupa tingginya harga energi dan melambatnya ekonomi dunia.

Membaiknya ekonomi juga diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tingkat kemiskinan terus menurun dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 13,3 persen pada tahun 2009 dan 12,4 persen pada tahun 2011. Penurunan kemiskinan dipercepat dengan program untuk rakyat miskin dalam jumlah yang terus meningkat dengan persentase yang lebih luas. Lapangan kerja terus meningkat melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 7,9 persen pada tahun 2009 dan 6,3 persen pada tahun 2012.

Pembangunan SDM juga semakin membaik ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai indikator SDM dalam MDG. IPM meningkat dari 0,572 menjadi 0,617. Pembangunan pendidikan dan kesehatan menempati posisi penting dalam pembangunan nasional yang diupayakan melalui peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan keadilan yang lebih merata, perhatian khusus terus diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam memperoleh pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, anak-anak berusia 7 – 15 tahun diberi kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan dasar. Demikian pula masyarakat yang tidak mampu diberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui berbagai program.

Stabilitas politik dan sosial terus terjaga. Di bidang politik, Indonesia merupakan negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Demokrasi, modernitas, dan agama, berdampingan secara harmonis. Proses konsolidasi demokrasi terus dimantapkan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan jumlah pemerintah daerah sekitar 530, Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah dua kali pada tahun 2004 dan 2009 secara jujur, adil, dan aman.

Di bidang hukum, Pemerintah memberikan komitmen penuh untuk menegakkan prinsip negara hukum melalui penegakan *rule of law*, supremasi hukum, dan kesetaraan di depan hukum sebagai pelaksanaan mandat konstitusional. Tata kelola pemerintahan menuju Pemerintah yang bersih dan bebas KKN terus diperbaiki. Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan K/L pusat meningkat dari 41 persen pada tahun 2009 menjadi 63 persen pada tahun 2011. Jumlah PTSP di daerah meningkat dari 3611 menjadi 420. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa diskriminasi terus diperkuat dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus meningkat dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 pada tahun 2011. Selain itu, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sedang disusun pemerintah diharapkan dapat memberi gambaran yang lengkap dan terarah tentang langkah-langkah percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan.

Situasi keamanan dalam negeri terus terjaga dengan baik. Kegiatan aksi terorisme terus ditingkatkan melalui penangkapan teroris dan pengungkapan jaringannya. Gangguan kamtibmas menurun dengan meningkatnya upaya pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. Di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin meningkat kemampuan dan profesionalitasnya. Pemhangunan TNI ditujukan untuk mengemban TNI yang tidak saja terlatih, namun juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam pengugasan, didukung dengan upaya modernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan.

Pada tatanan hubungan internasional, peranan dan sumbangan Indonesia terus meningkat dalam penentuan tatakelola global dan pemecahan permasalahan global. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Indonesia bersama dengan negara-negara sehaluan terus menyuarakan pentingnya reformasi tatakelola pemerintahan global, termasuk agar PBB lebih berkeadilan dan mencerminkan realitas internasional dewasa ini. Dalam kerangka ekonomi, Indonesia mendorong upaya reformasi sistem moneter internasional untuk membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan. Ketetapan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 telah memberi manfaat positif bagi kemajuan ASEAN dan bagi terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara.

Dalam tahun 2012, upaya pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Di bidang ekonomi, prioritas diberikan pada upaya untuk menjaga

pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal, memperluas lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan ketersediaan pangan. Di bidang kesejahteraan rakyat, prioritas diberikan pada upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan pencapaian MDG dan pengurangan kemiskinan. Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, prioritas diberikan pada upaya untuk memberantas korupsi, mempercepat reformasi birokrasi, serta menangani konflik horizontal dan eksekusi pemelukada.

2. TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Dalam tahun 2013, kondisi perekonomian global tetap dibayangi oleh ketidakpastian. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa, ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan hanya tumbuh 4,1 persen, lebih rendah dari tahun 2011 (5,3 persen) dengan resiko pemulihan ekonomi yang lambat di negara-negara maju dan perlambatan ekonomi di Asia. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan proteksi pada banyak negara serta langkah tidak sehat untuk mempertahankan pasar domestik dan eksponnya. Persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi semakin ketat. Keseluruhan ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing baik di tingkat global maupun di dalam negeri.

Dalam pada itu, kemajuan pembangunan ekonomi telah mendorong harapan yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan semakin tinggi. Pengurangan jumlah penganggur terbuka dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 sebesar 7,7 juta orang dan 29,9 juta orang akan dipercepat. Selanjutnya kesenjangan kesejahteraan baik antar kelompok masyarakat maupun antar daerah akan dikurangi melalui upaya peningkatan dan sekaligus perluasan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010 – 2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan, TEMA RKP tahun 2013 adalah :

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sebagaimana RKP pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya;
13. Bidang Perekonomian lainnya;
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Berdasarkan tema RKP 2013 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis sebagai berikut.

PENINGKATAN DAYA SAING

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi;
4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda;

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton;
6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi;

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Kluster I-IV;

PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK

9. Persiapan Pemilu 2014;
10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi;
11. Percepatan Pembangunan *Minimum Essential Force*.

Daya saing ekonomi Indonesia pada tahun 2013 akan lebih ditingkatkan guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia dan persaingan global yang semakin ketat. Potensi perekonomian domestik yang besar akan lebih ditumbuhkembangkan. Investasi terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, akan ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur akan dipercepat untuk memperkuat *national connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Daya saing nasional juga ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya industri, pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya koridor-koridor ekonomi

dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selanjutnya penciptaan kesempatan kerja khususnya Tenaga Kerja Muda akan ditingkatkan guna meningkatkan daya saing perekonomian.

Dengan situasi perekonomian dunia yang tetap tidak pasti, daya tahan perekonomian terus diperkuat. Kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan terus dimantapkan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapai sasaran surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Dengan tingginya harga minyak mentah dunia, ketahanan energi diperkuat melalui perluasan penyediaan listrik terutama non BBM, konversi BBM ke BHH untuk transportasi, serta pemanfaatan berbagai potensi energi (diversifikasi energi) terutama energi terbarukan.

Pembangunan terus didorong untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan memperluas pemerataan pembangunan. Derajat kesehatan, status gizi, dan taraf pendidikan akan terus ditingkatkan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan dalam persaingan global, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyakit lingkungan; peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; serta peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, penurunan pengangguran dan kemiskinan akan dipercepat. Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah, yang relatif masih tinggi akan disurangi. Upaya penurunan pengangguran dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong pembangunan industri dalam kerangka MP3EI. Perhatian khusus diberikan untuk mengatasi pengangguran usia muda yang tingkatnya jauh lebih besar dari tingkat pengangguran secara umum. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan sinergi dan efektivitas program klaster I – IV serta konsolidasi anggaran di berbagai kementerian/lembaga, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Kebijakan ini merupakan langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan stabilitas sosial politik, tata kelola Pemerintahan akan ditingkatkan. Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah